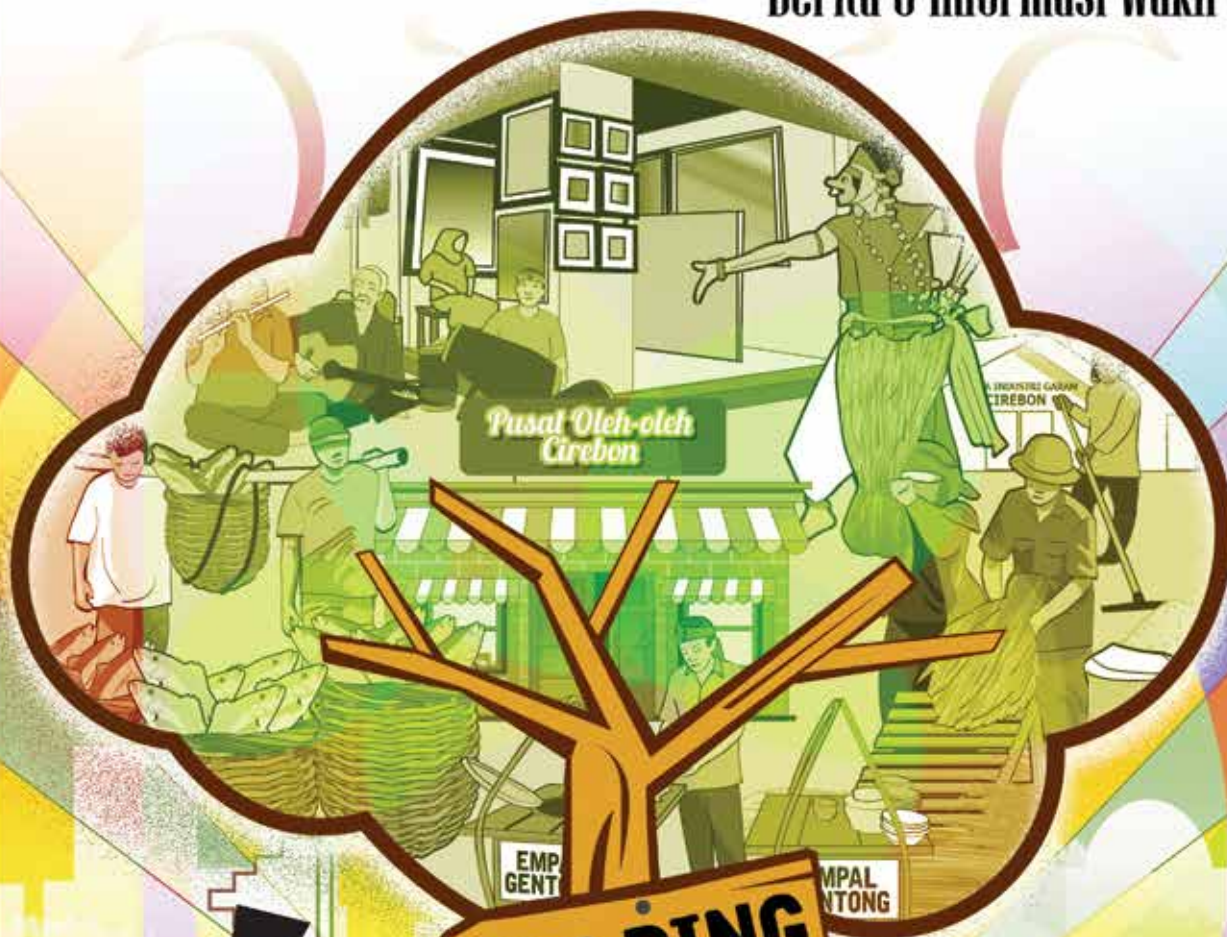




Cirebon Katon

Berita & Informasi Wakil Rakyat



Agar Bumdes Terus Tumbuh

Kesalehan Sosial



Hingga kini pandemi Covid-19 masih belum dinyatakan berhenti. Obat dan vaksin belum secara resmi diumumkan telah ditemukan. Pembatasan aktivitas, sejak Maret (di Indonesia) hingga kini masih berlangsung. Meski dengan istilah transisi atau adaptasi kebiasaan baru.

Berjibaku dalam keterbatasan aktivitas memang terlihat sulit. Namun bagi kami justru menjadi motivasi agar terus bergerak. Mencari bahan dan menyajikan isi majalah yang layak untuk dinikmati khalayak.

Pengorbanan dan kesabaran menjadi modal kami. Sebagaimana kami belajar dari kisah Ibrahim AS dan Ismail AS. Sebuah kisah masyhur tentang arti sebuah pengorbanan dan kesabaran atas dasar cinta terhadap Tuhannya. Sebuah hikmah yang menguatkan jalan perjuangan kami.

Qurban adalah bagian dari kesalehan sosial. Berbagi kebaikan meski di tengah masa

sulit pandemi. Teladan saling berbagi itulah yang membuat kami terus berjuang berbagi informasi. Kebahagiaan bagi kami adalah ketika mampu menyajikan sebuah karya. Uraian tulisan yang dapat dinikmati dan diapresiasi pembaca. Semoga setiap tulisan bisa bermanfaat.

Dalam upaya itu kami sangat sadar keterbatasan, kekurangan, dan kelemahan tidak luput dari kami manusia biasa. Oleh sebab itu, saran dan masukan pembaca selalu diharapkan.

Kami berterima kasih kepada seluruh pembaca, atas respon saran dan masukan. Akan kami lanjutkan dengan terus mengasah kemampuan. Memadukan masukan dengan kreativitas tim, agar kami dapat menyajikan isi majalah yang manfaat dan berkah.

Akhirnya, dengan mengambil hikmah dari kisah Ibrahim AS dan Ismail AS, kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 H. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang saleh baik di depan Tuhan maupun secara sosial.

Pembina/Penasehat :

H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Pengarah :

Muklisin Nalahudin, SH, MH.
(Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kab. Cirebon)

Munawir, SH.
(Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kab. Cirebon)

Abdul Rohman
(Ketua Komisi 1)

Mad Saleh
(Ketua Komisi 2)

H. Hermanto, SH
(Ketua Komisi 3)

Drs. H. Rasida Edy Priatna, MM
(Ketua Komisi 4)

Pimpinan Umum/Pimpinan Redaksi :

Ikin Asikin, S.Sos, M.Si
(Sekretaris DPRD Kabupaten Cirebon)

Wakil Pimpinan Redaksi :

Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
(Kabag persidangan)

Drs. H. Sucipto, MM
(Kabag Perundang-undangan)

Redaktur Pelaksana :

Mochammad Nurhiyana, S.STP., M.Si
(Kasubag Humas dan Protokol)

Redaksi Ahli :

S. Yudi

Penyunting :

Wiwin Winarti, S.IP
(Kasubag Rapat dan Risalah)

Ardiles Afla Jatiwanto
(Kasubag Rumah Tangga)

Redaktur :

IA Fazri

Reporter :

Firman • Maulana • Adi • Yusuf • Mahardika

Fotografer :

Alfian

Desain Grafis :

Boyke Datu • Andri

Data dan Riset :

Oman • Ihsan

Distribusi :

Adiw

Korespondensi:

redaksi.cika@gmail.com

Penerbit :

Sekretariat DPRD Kabupaten Cirebon

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber Cirebon
• Telp. 0231 32150 • Kode Pos 45611



04 | FOKUS

**Pembentukan Holding
Agar Bumdes Terus Tumbuh**

**10 | Hamzah Fansuri:
Holding Harus Didukung SDM Berkualitas**



14 | KILAS

Evaluasi Penanganan Covid-19



18 | PUBLIKA

Jalan Slangit-Bulak Rusak



20 | LENSA

Topeng Klana Teruslah Berkelana



22 | DINAMIKA KOMISI

Perlu Perbup Penggunaan Dana Desa

**24 | Komisi II Ingin Direksi BPR
Astanaajapura Dilengkapi**

26 | Kamarang Kelola Sampah dengan Perdes

**28 | Produktivitas Padi
Panguragan-Kapetakan Dihantui Banjir**



30 | PROFIL

**Rudiana:
Kebaikan Akan Menemukan Jalannya**



33 | INSPIRASI

**Agrowisata Gedong Gincu
Mendunia, Berawal dari 35 Bibit Gratis**

36 | POTENSI

**Pepaya California
Potensi Tonjong Menarik Wisatawan**

Pembentukan Holding Agar Bumdes Terus Tumbuh

Tiga belas tahun berlalu, setelah Perbup ditandatangani, hanya beberapa Bumdes yang sukses. Lebih banyak yang tak beres. Lantas, bagaimana solusi yang pas untuk mendongkrak keberlangsungan Bumdes?



Tak banyak pertimbangan. Hanya satu hal yang membuat Bupati Dedi Supardi meneken peraturan bupati (Perbup). Payung hukum yang ditetapkan 13 tahun lalu itu tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

“Dalam rangka meningkatkan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian masyarakat perdesaan, maka dipandang perlu untuk mendorong pembentukan Bumdes,” begitu bunyi pertimbangan Perbup yang diteken 28 September 2007 itu.

Pertimbangan di atas jelas menggambarkan situasi kala itu. Pusat-pusat perekonomian harus mulai dibangun di desa-desa. Di sisi yang lain, ban-

yak desa yang memiliki potensi menjadi penggerak ekonomi.

Setelah Perbup itu diundangkan, beberapa wajah desa yang terpinggirkan kini mulai tampil membanggakan. Salah satunya Desa Cupang. “Kami merasakan selama ini terpinggirkan. Akses jalan yang jauh bahkan harus melewati kabupaten lain. Tapi, kami ingin bangkit dan membuktikan bahwa desa kami bisa maju,” jelas Pengurus Karang Taruna Desa Cupang, Arif.

Melalui wadah Bumdes dan Karang Taruna mereka memanfaatkan potensi alam menjadi destinasi wisata. “Dengan adanya Wisata Batu Lawang, Alhamdulillah secara bertahap perekonomian ma-



sarakat tumbuh,” jelas Mulyono, Ketua Pengelola Wisata Batu Lawang Cupang.

Selain Cupang, ada Desa Ambulu dan Ciawigajah yang sukses potensi desa dengan Bumdes. Ambulu ciamik mengembangkan wisata mangrove. “Potensi itu muncul bisa dari lingkungan sekitar. Bagaimana kita bisa melihat semua potensi tersebut menjadi sebuah peluang bahkan mendatangkan uang,” jelas Markis, Komisaris Bumdes Ambulu.

Kurang dari satu tahun wisata mangrove Caplok Barong di Desa Ambulu, Kecamatan Losari, telah

berkembang pesat. Ini tidak lepas dari motivasi dan semangat tinggi pengurus Bumdes dan pengelola wisata untuk terus berkreasi. “Kita punya konsep yang Wownya gak habis-habis, karena pengunjung akan selalu menemukan hal-hal baru yang keren dan unik disini,” lanjutnya.

Hal terpenting dari adanya wisata mangrove tersebut adalah pemberdayaan masyarakat sekitar. “Kita lakukan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya eko wisata ini masyarakat dilibatkan untuk berperan serta mengisi sektor-sektor ekonomi. Seperti

warung, souvenir, dan juga akan dibuatkan rumah produksi ikan bandeng sebagai ciri khas Losari,” jelas Markis.

Kisah Bumdes sukses, yang tak kalah menariknya, adalah Bumdes Mitra Usaha Bangun Desa (MUBD), milik Pemdes Ciawigajah. Bumdes di Kecamatan Beber ini sukses mengelola enam unit usaha berupa PDAM desa, pabrik air dalam kemasan Ciawiwater, Pengolahan Sampah Mandiri, Agrowisata, Pertanian, dan Peternakan.

“Kami sudah membukukan keuntungan per tahun Rp 150 juta, dan memberikan PAD sebesar Rp 60 juta. Dengan pengembangan usaha, kami menargetkan keuntungan sebesar Rp 3 miliar,” jelas Ketua Bumdes MUBD Ahmad Fauzi Bisri.

Bumdes MUBD telah berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. “Usaha ini dijalankan bersama warga desa, sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Dan yang bekerja pun mendapatkan penghasilan tetap. Sehingga, sedikit demi sedikit permasalahan di pedesaan dapat diselesaikan terutama masalah ekonomi,” Jelasnya.

Tak Cukup Perbup

Kesuksesan Bumdes Cupang, Ambulu, dan Ciawigajah hanyalah secuil dibanding 412 Desa di Kabupaten Cirebon. Masih lebih banyak Pemdes yang belum berhasil memiliki Bumdes yang sukses. Padahal, jika itu terjadi, ekonomi masyarakat desa akan berdaya.

Perbup No 23 Tahun 2007 memang bertujuan untuk itu. Dalam Pasal 3 menyebutkan; a. Menghindarkan anggota masyarakat desa/kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat;

b. Meningkatkan peranan masyarakat desa/kelurahan dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah dan pemerintah desa dan dari sumber-sumber lain yang sah.

Selanjutnya, c. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan bergotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan. d. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa; e. Mendorong perkembangan usaha sektor informal untuk dapat penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa/kelurahan; f. Meningkatkan kreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah;

Pembentukan dan pengelolaan Bumdes menggunakan prinsip dasar pemberdayaan, keberagaman, partisipasi, dan demokrasi (Pasal 4). Prinsip-prinsip dasar tersebut dapat dimaknai bahwa Bumdes adalah rumah masyarakat dalam sektor usaha. Masyarakat dapat turut serta mengambil peran untuk kemajuan desa melalui kegiatan perekonomian.

Sayangnya tujuan baik Perda ini belum dilengkapi dengan bagaimana cara menggapai tujuan itu. Sebagian besar masalah Bumdes adalah pada pembinaan. Di Perbup pasal yang mengatur pembinaan ini hanya dua ayat. Pertama bahwa pembinaan teknis dilakukan oleh instansi pemerintah daerah. Kedua, pembinaan itu bisa berupa pelatihan teknis manajemen, pendampingan, monitoring, dan evaluasi.

Nyatanya permasalahan Bumdes tidak sesederhana itu. Apalagi kultur instansi pemerintah sebagai pembina tentu beda dengan kultur kewirausahaan.



“Karena mungkin masih minim pengalaman, terus belum bisa membaca potensi yang dapat dikembangkan secara maksimal untuk kegiatan Bumdes, sehingga Bumdes berjalan tidak maksimal,” jelas Andi selaku aparat desa Cikeusal.

Butuh Holding

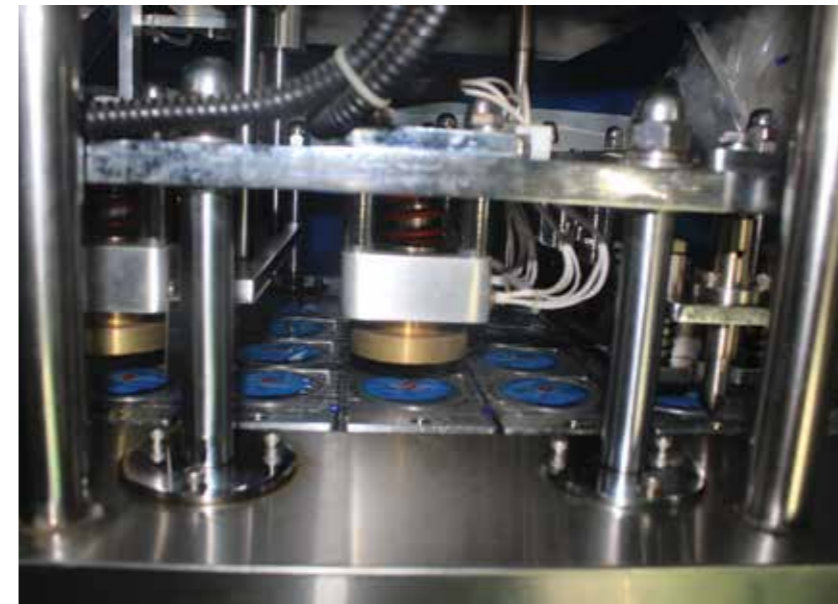
Setidaknya ada empat persoalan dasar yang menjadi faktor banyak Bumdes belum berjalan maksimal, yakni permodalan, manajemen dan kapasitas SDM, produksi, serta pemasaran. Empat hal inilah yang kebanyakan menguak ke permukaan dari kebangkrutan Bumdes.

Dari segi permodalan, Bumdes umumnya mengandalkan modal pangkal dari pemerintahan desa. Sehingga jumlahnya tidak maksimal dan kurang mendongkrak aktivitas kegiatan dan produksi. Maka dibutuhkan inovasi permodalan oleh para

pengelola Bumdes. Namun demikian, keterbatasan Sumber Daya Manusia dalam memahami cara mendapatkan modal menjadi kendala.

“Usaha kami sebetulnya telah berjalan dan progresnya lumayan. Hanya saja untuk mengembangkan menjadi unit usaha yang lebih besar, misalnya membangun saung di area ini butuh modal besar. Sementara modal hanya mengandalkan Pemdes yang kadang harus terbagi dengan kebutuhan lainnya. Sementara kami juga tidak begitu paham bagaimana cara mendapatkan dana selain dari Pemdes,” jelas Samsul pengelola Bumdes Jungjang.

Persoalan selanjutnya pada proses produksi atau kegiatan usaha. Tidak sedikit Bumdes yang telah terbentuk namun mati suri. Mereka bingung mau melakukan usaha apa. Atau sudah berupaya memproduksi,



namun hasilnya tidak maksimal. “Kadang kita bingung gimana caranya membuat sesuatu yang benar, meningkatkan kualitas produk,” jelas Kaspari, Sekdes Cikeusal.

Setelah berhasil memproduksi muncul masalah pemasaran. Banyak Bumdes yang kebingungan memasarkan hasil produksinya. Mereka kurang paham bagaimana strategi marketing,

sehingga distribusi produk dilakukan secara tradisional. Maka wajar bila hasilnya tidak maksimal dan membuat semangat menurun.

Berbagai persoalan terkait permodalan, produksi, dan pemasaran muaranya adalah pada peningkatan Sumber Daya Manusia para pengelola Bumdes. Untuk menyelesaikan ini tentu tidak bisa dengan pendekatan

pembinaan ala pemerintahan. Tapi harus dengan pendekatan kewirausahaan.

Perlu ada institusi bisnis yang melakukan pembinaan dan pendampingan dengan pola *business to business*. Salah satu metode yang bisa dilakukan adalah dengan pembuatan usaha induk (holding) bagi Bumdes. Holding inilah yang akan melakukan pendampingan dari hari ke hari. Karena kewirausahaan tidak bisa hanya dengan pelatihan kemudian dilepas begitu saja.

Persoalan permodalan, misalnya, bisa dengan pengajuan permodalan perbankan dengan biaya rendah. Bisa juga dengan pola kerjasama sesama Bumdes atau swasta. Dengan demikian, potensi untuk mengembangkan dan memajukan Bumdes terbuka lebar.

Adapun soal produksi, Bumdes akan mendapat pendampingan agar bisa menghasilkan produk sesuai market. Sehingga potensi yang dikembangkan oleh Bumdes tepat sasaran sesuai pasar. Selain itu, SOP produksi perlu dibuat agar produk yang dihasilkan memiliki konsistensi dan berkualitas.

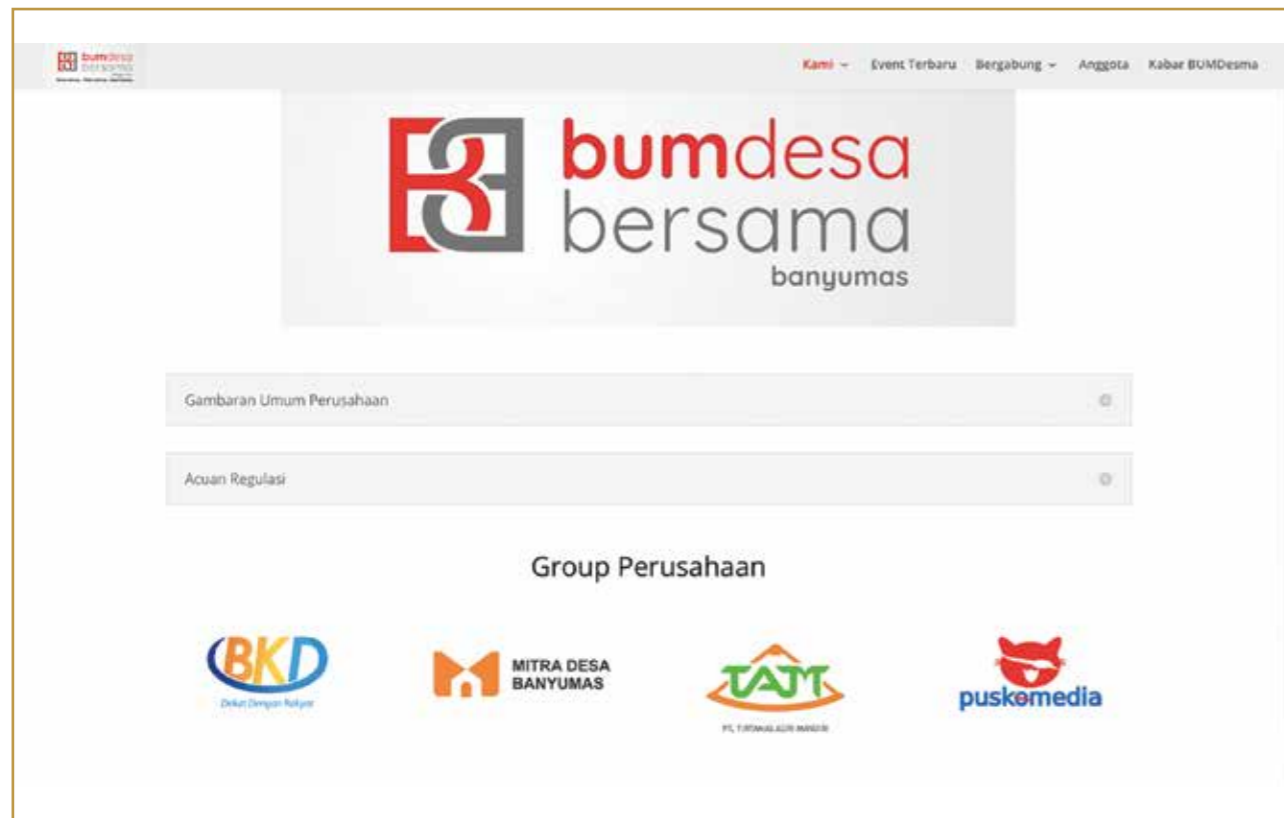
Terakhir, kunci sukses produk agar sampai dan dinikmati oleh konsumen adalah pada strategi pemasaran, mulai dari pengemasan, komunikasi produk, hingga distribusi. Teknologi informasi berkembang sedemikian pesat, maka pemasaran pun harus mengikutinya.

Untuk mewujudkan perusahaan induk, tentu tidak cukup dengan Perbup. Perlu ada payung hukum yang lebih kuat, setidaknya berupa Perda. Selain payung hukum, Perda juga yang memberikan panduan strategis pengembangan Bumdes sesuai dengan kondisi faktual. •Mol

Belajar dari Banyumas

Holding Bumdes Berperan Strategis

Holding Bumdes di Banyumas kini sudah melahirkan empat anak perusahaan. Dua anak perusahaan di antaranya merupakan perusahaan *joint venture* dengan perusahaan nasional.



Raperda Bumdes dan Holding (induk) Bumdes telah masuk dalam Propemperda. Kini sedang diramu Bapemperda DPRD Kabupaten Cirebon agar menjadi Perda. Tentu saja payung hukum ini akan menjadi pijakan berdirinya Holding Bumdes. Namun, sebenarnya seperti apakah peran strategis perusahaan induk ini?

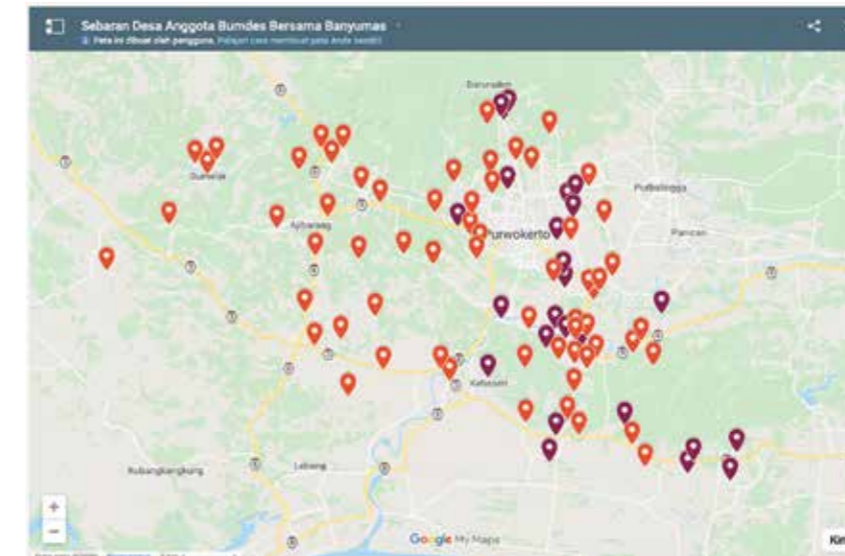
Ide perlunya pendirian holding Bumdes sebenarnya berawal dari keprihatinan DPRD Ka-

bupaten Cirebon akan kondisi Bumdes saat ini: ada yang sukses namun banyak yang berguguran. Hasil penggalan informasi dari masyarakat setidaknya ada lima persoalan yang membuat Bumdes susah berkembang.

Pertama, belum terasahnya visi bisnis pengelola Bumdes dan perangkat desa. Sehingga mereka kurang sensitif dalam melihat potensi bisnis yang ada di desa. "Ada desa yang memiliki kondisi alam yang luar biasa,

namun mereka tidak melihatnya sebagai sebuah potensi bisnis. Dengan adanya Holding nanti dibantu menginventarisasi potensi yang ada," jelas Mohamad Luthfi Ketua DPRD Kabupaten Cirebon.

Kedua, kemampuan manajerial pengelola. Masih banyak pengelola yang lebingungan dalam mengelola usaha, terutama dalam membuat proyeksi keuangan. "Ini penting bagaimana usaha mau jalan menentukan



harga pokok produksi (HPP) saja bingung, apalagi bikin cashflow, dan proyeksi penjualan," jelasnya.

Ketiga, manajemen produk dan produksi. Produk itu butuh konsistensi dan standar kualitas. Untuk itu dibutuhkan standar operasional prosedur (SOP) dalam pembuatan produk. Keempat, kreativitas pemasaran. Tanpa, program pemasaran yang andal, produk yang sudah dibuat dengan baik akan sulit terjual.

Kelima, akses permodalan. Modal ini bukan hanya pada saat pendirian usaha, tapi juga saat pengembangan. "Ada Bumdes yang penjualannya meledak, tapi kapasitas produksinya terbatas. Tidak ada modal untuk menambah mesin. Buat beli mesin baru tidak ada uang. Nah, kasus seperti ini kan perlu kita bantu. Itu nanti tugasnya Holding," paparnya.

Kelima persoalan di atas, terutama satu sampai empat, muaranya adalah pada kemampuan SDM. Untuk melahirkan SDM yang andal tentu tidak bisa instan. "Perlu pendampingan dan proses inkubasi di Holding," tandasnya.

Peran strategis lainnya dari Holding adalah membangun akses dan jejaring bisnis dalam lingkup yang lebih luas, bisa secara nasional maupun internasional. "Kalau produk kita menarik bagi pasar internasional, kenapa tidak kita ekspor?" jelasnya bersemangat.

Belajar dari Banyumas

Pada 2017 sebanyak 23 desa di Banyumas membentuk perusahaan holding Bumdes (Bumdes Bersama atau Bundesma), dengan nama PT Brayan Bumi Banyumas (Persero) Holding (BBB). BBB pun langsung memainkan peran strategis.

Selang setahun setelah berdiri, BBB menggandeng PT Accenture Management Power membuat anak perusahaan: PT Energi Barikade Indonesia. Anak perusahaan ini bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik, kontraktor dan konsultan ketenagalistrikan di wilayah Indonesia.

Tak hanya itu, pada 2019 BBB kembali membuat anak perusahaan. Kali ini menggandeng PT Mitra Bumdes Nusantara (MBN). MBN adalah perusahaan

yang didirikan dengan pemilik saham tujuh BUMN: Perum Bulog, Danareksa, Pertamina Retail, PPI, RNI, PIHC dan PTPN 3.

Sebuah langkah yang luar biasa. PT Mitra Desa Banyumas (MDB) begitu nama anak perusahaan itu, dengan komposisi saham MBN sebesar 55% dan BBB sebesar 45%. MDB bergerak sebagai perusahaan agregator perdagangan, industri pengolahan, dan penyedia layanan jasa untuk menggerakkan perekonomian desa. Salah satu garapan MDB adalah mengembangkan potensi produk unggulan kawasan pedesaan.

Selain dua perusahaan joint venture tersebut, BBB juga melahirkan dua anak perusahaan: PT Tirtamas Agri Mandiri (TAM) dan PT Puskomedia Indonesia Kreatif (KIF). TAM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jaringan usaha agribisnis dengan memproduksi produk turunan dari sektor produksi pertanian dan peternakan.

Sedangkan KIF memposisikan diri sebagai laboratorium digital kreatif, yang memberikan solusi dengan bantuan teknologi informasi. Fokus KIF adalah menciptakan karya-karya digital untuk membantu kegiatan sehari-hari.

Selain itu, di dalam website resmi mereka, bumdesbersama.id, mencantumkan PT Bank BKD Banyumas (Persero) sebagian bagian dari grup BBB. BKD bergerak di jasa keuangan mikro, bahkan kini sudah mengembangkan usahanya dengan memasuki sektor UMKM.

Langkah Banyumas ini menunjukkan bahwa holding menjadi sebuah keharusan untuk kemajuan Bumdes. Dengan Holding Bumdes jadi bum! •iud/fal

Hamzah Fansuri: Holding Harus Didukung SDM Berkualitas

Kisah sukses Kabupaten Banyumas menunjukkan bahwa Bumdes bisa menjadi raksasa bisnis. Namun, tanpa didukung SDM yang kuat, *holding* juga akan susah menggelinding.



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon kini sedang menggodok Perda Bumdes dan holding Bumdes. Tentu saja tujuan utamanya adalah agar memperkuat perekonomian desa dengan Bumdes yang beridiri kokoh.

Untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan

agar holding Bumdes bisa berjalan dengan sukses, Redaksi Cirebon Katon mewancarai Ketua International Council For Small Business (ICSB) Kabupaten Cirebon, Hamzah Fansuri. ICSB adalah lembaga nirlaba yang fokus pada pemberdayaan UKM dan membawa produk terbaik ke pasar internasional. Berikut petikan wawancaranya:

Dalam kondisi pandemi bagaimana aktivitas pengembangan UKM yang Anda lakukan?

Saya punya UKM penjualan kerajinan tangan yang terbuat dari kayu dan triplek seperti kraft dan celengan. Omsetnya pun lumayan. Tak sedikit. Saya juga ekspor sampai ke negara tetangga. Tempat usahanya berada di Jalan Tengahtani.

Namun sejak masa pandemi ini, saya lagi fokus jadi dropshiper ekonomi kreatif dari produk kasur dan bantal squishy yang lagi trend dari teman-teman saya di Bandung. Dengan dijual secara konvensional dan digital. Kualitasnya juga cukup bagus, elastisnya tidak kalah dengan bantal yang ada di hotel.

Saya pikir di masa pandemi ini menjadi tantangan bagi para pelaku UKM seperti saya, karena kita harus memutar otak kita agar bisa bertahan di masa resesi, untuk melakukan inovasi dan strategi pasar. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), telah membuat *mindset* para pelaku UKM konvensional untuk meleak digitalisasi.

Terkait dengan pemberdayaan usaha bagaimana menurut Anda potensi Bumdes?

Melalui komunitas UMKM di Kementerian Koperasi, saya bersentuhan dengan Bumdes. Bumdes inikan *leading sector* penggerak ekonomi di desa. Salahsatunya saya pernah bermitra dengan Ketua Forum Bumdes dua tahun lalu dalam bidang jasa. Nah beberapa produk unggulan Bumdes yang terbaik kita *support* untuk bisa masuk ke galeri kami, saya memiliki galeri UMKM di Tengahtani, sampai sekarang masih ada.

Bumdes itu lokomotif



ekonomi di tingkat desa. Kita suport untuk memberikan pelatihan, pendampingan, fasilitasi akses permodalan, dan pemasaran. Karena kalau bicara ekonomi ada dua faktor: permodalan dan pemasaran.

Potensi Bumdes itu sangat besar, sudah saatnya kita harus mendorong Bumdes untuk bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya dengan Kemendes saja. Saya pernah mendampingi Bumdes Karang Wangi, Kecamatan Depok, yang memiliki produk hidroponik. Saya bantu memanageri mereka, dari SDM-nya dan segmen pemasaran.

Bagaimana penilaian Anda terhadap Bumdes yang ada di Kabupaten Cirebon?

Data terakhir total yang saya tahu di Kabupaten Cirebon ada 35 ribu UKM dan 383 Bumdes yang bisa berkembang. Namun tidak sedikit pula yang layu sebelum berkembang. Hal itu karena mereka tidak fokus kepada pematangan SDA dan SDM-nya. Kemudian model pemasaran, maupun model bisnisnya.

Artinya *planing* model bisnisnya seperti apa, kadar itu harus ditentukan, agar bisa meminimalisasi *human eror*, dan kegagalan. Bumdes itu keba-



ngkitan ekonomi desa, sudah sepatutnya peran pemuda untuk berkontribusi disana.

Untuk saat ini, sebenarnya Bumdes di Kabupaten Cirebon cukup bagus dibanding tahun sebelumnya. Namun belum adanya wadah yang secara khusus menaungi dari 412 desa yang mampu mendorong secara intens. Sekalipun sudah ada forum Bumdes, namun masih kurang support dan kurangnya akses pada dinas terkait maupun swasta.

Bumdes itu tidak mungkin bisa berjalan sendiri, perlu berkolaborasi dengan akademisi, pelaku usaha lain, komunitas, dan media. Sehingga sejauh ini Bumdes belum bisa berjalan secara maksimal, belum terfasilitas dengan pelatihan dan pendampingan. Padahal kalau melihat potensinya, Bumdes sangat berpotensi.

Bagaimana dengan ide pendirian holding Bumdes?

Kalau menggunakan holding itu memang bagus, tapi saya pikir besar juga resikonya, ketika SDM-nya belum mum-

puni. Artinya kalau kita bicara Holding, berarti harus siap terlebih dahulu SDM-nya, Saya analogikan seperti *hardware*. Menurut saya jangan bicara holdingnya ketika manusianya belum mampu pendayagunaan.

Apalagi kalau kita lihat undang-undang, bahwa alokasi pendanaan Bumdes bisa mengambil 30 persen dari dana desa. Apakah dengan dana sebesar itu mampu menjalankan sistem holding? Ketika SDM-nya tidak mumpuni.

Kalau tidak mampu, menurut saya kita harus melalui langkah konkret dengan pemberdayaan sampai ke tahap pengembangan terlebih dahulu, baru kita bicara sistem. Jadi, holding bagus tapi langkah awalnya pembangunan SDM.

Selain SDM apalagi yang perlu dibenahi?

Harapan saya, ada pengkajian terlebih dahulu melalui tim akademis untuk mengidentifikasi Bumdes yang sudah maju, maupun yang layu sebelum berkembang. Kita harus melek.

Bumdes kita harus fokus pada *link and match*-nya. Ketika sudah baik, saya kira baru dibuat holding Bumdes. Kalau jalan ini dan tidak menutup kemungkinan akan mengubah tingkat kemiskinan di Kabupaten Cirebon, bahkan bisa jadi prestasi.

Konsep Bumdes seperti apa yang tepat untuk Kabupaten Cirebon sekarang?

Pertama, harus mengidentifikasi dari potensi daerahnya. Uraianya jelas, potensinya apa, indikatornya harus jelas. Siapa sih, target *marketing*-nya? Kita bicara sosial atau komersial.

Nah, yang tak kalah penting, saya lebih setuju penguatan dari Perdes-nya terlebih dahulu. *Output* Bumdes yang sudah berjalan, di bidang apapun, harus didukung perdes. Sebagai contoh di sektor pertanian, maka masyarakat diwajibkan ikut andil penanaman atau penghijauan di rumahnya.

Setelah itu, baru bicara Perda. Pertama, Perda harus mengatur pemerintah agar memberdayakan UKM agar bisa menyalurkan produknya ke retail modern atau perusahaan besar. Ketika produk itu sudah disetorkan, perusahaan wajib menggelontorkan konsinyasi 50-70 persen. Artinya ketika menyetorkan produk pelaku usaha sudah dapat keuntungan sehingga bisa memutar kembali modalnya. Biasanya harus menunggu 14 hari itupun kalau laku. Bayangkan kalau para pelaku UKM hanya punya modal sekali.

Kedua, suport penuh dari lembaga, kedinasan, maupun perusahaan, ketika mengadakan kegiatan harus menggunakan jasa atau produk Bumdes. Sehingga kerjasama dari hulu ke hilirnya itu konkret. •suf

#	Unit	Nomor Telepon
1	Polresta Kab. Cirebon	0231-204466
2	Polres Cirebon Kota	0231-205179
3	Pemadam Kebakaran Kab. Cirebon	0231-638249
4	Pemadam Kebakaran Kota	0231-484113
5	Ambulance	0231-206330 ext.1042
6	Pos SAR Cirebon	0231-8356347
7	Unit Transfusi Darah PMI Kota	0231-204964
8	Unit Donor Darah PMI Kota	0231-201003
9	Pengaduan PLN Kota Cirebon	0231-236551
10	Pengaduan Gangguan PDAM	0231-244222
11	PDAM Tirtajati (Sumber)	0231-321457
12	PDAM Kota Cirebon	0231-204800
13	Pengaduan Gas Kota Cirebon	0231-203323
14	Terminal Bis Harjamukti	0231-248902
15	Stasiun Kejaksan	0231-210444
16	Stasiun Parujakan	0231-202577
17	RSUD Arjawinangun	0231-358335 / 359090
18	RSUD Gunung Jati	0231-206-330
19	RSUD Waled	0231-661126; IGD: 0231-661275
20	RSIA Sumber Kasih	0231-203815
21	RS Ciremai	0231-238335
22	RS Hasna Medika	0231-343405; IGD: 0231-8825010
23	RS Mitra Plumbon	0231-323100
24	RS Pelabuhan	0231-230024 / 205657
25	RS Permata	0231-8338877 / 8338899; IGD 0231-8338881
26	RS Pertamina Klayan	0231-224797 / 224798; IGD: 08112433338
27	RS Putra Bahagia	0231-485654
28	RS Sumber Urip	0231-8302689
29	RS Sumber Waras	0231-341079

Evaluasi Penanganan Covid-19

Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pertemuan kali ini membahas evaluasi penanganan Covid-19, terutama di tingkat pedesaan.



Foto-foto : dok setawan

Pengelolaan Retribusi Menara Telekomunikasi

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon Mad Saleh memimpin rapat dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cirebon, dalam rangka pembahasan Pengelolaan PAD dari Retribusi Menara Telekomunikasi.



Foto-foto : dok setawan

Aktivis Lingkungan Turut Evaluasi Penanganan Sampah

Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon melakukan rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan aktivis lingkungan dari Koppel, Kobar dan Forkoci. Rapat ini merupakan evaluasi peran masyarakat dalam partisipasinya menangani sampah.



Foto-foto : dok setiawan

Evaluasi Penyaluran BPNT

Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Bank BNI KCU Cirebon. Kunjungan ini untuk tindaklanjuti proses penyempurnaan penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Cirebon.



Foto-foto : dok setiawan

Parkir Sembarangan di Kawasan Plered



Tanya :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bapak/Ibu Dewan kok yang memarkir kendaraan hingga memakan badan jalan sampai menimbulkan kemacetan di jalur Plered ataupun pelaku usahanya tidak dikenakan sanksi atau denda apapun, ada apa?

Sebagai pengguna jalan tentu banyak masyarakat yang mengeluhkan dengan kemacetan di jalur tersebut. Bagaimana Bupati...? Bagaimana ketua DPRD beserta jajarannya selaku wakil rakyat? Sampai kapan ini akan terus terjadi di Kabupaten Cirebon?

Harry Abiyagi, Klangeran

Jawab :

Waalaiikum salam, Harry. Terimakasih sudah berbagi informasi. Kami coba akan sampaikan ke instansi terkait agar ekonomi kawasan tetap jalan, namun tetap tidak mengganggu pengguna jalan lainnya.

Untuk jangka panjang memang harus ada pembenahan kawasan Trusmi-Plered sebagai destinasi wisata. Beberapa kajian pembuatan grand design sudah dilakukan oleh para pemangku kepentingan. Semoga bisa lebih cepat terealisasi. Agar bisa memberikan dampak ekonomi yang maksimal, dan ketertiban terjaga.



Jalan Slangit-Bulak Rusak

Tanya :

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Sudah sangat lama jalan Desa Slangit rusak, sehingga mengganggu aktifitas perekonomian masyarakat. Kerap kali terjadi kecelakaan lalu lintas yang memakan korban. Apalagi jalan antara Desa Slangit dan Desa Bulak. Udah seperti bukan jalan.

Tolong dipantau dong, didorong untuk segera diperbaiki sebelum memakan korban lagi. Saya sebagai warga Cirebon malu dan iri sama warga kabupaten tetangga melihat keadaan seperti itu. Terima kasih. Wassalam

Nurul Iman Ilyas, Klangeran.

Jawab :

Waalaiikum salam Nurul. Terimakasih atas informasinya. Kami akan sampaikan ke komisi dan dinas terkait. Semoga bisa segera diatasi.

Usul Revitalisasi Bangunan Bersejarah



Tanya:

Assalamu'alaikum wr.wb.

Cirebon memiliki banyak peninggalan sejarah. Sebenarnya bisa menjadi daya tarik tersendiri untuk menjadi daerah tujuan wisata. Namun banyak tempat-tempat bersejarah yang tidak terurus seperti Balong Biru di desa Krandon, bangunan-bangunan tua di Jamblang, dan bekas pabrik gula Gempol.

Seharusnya pemerintah mendorong masyarakat untuk peduli melestarikan tempat-tempat itu. Apakah tempat-tempat seperti itu sudah terinventarisasi. Sejauh apa upaya yang sudah dilakukan untuk mengembangkan potensi yang ada?

Terima kasih.

Hadi, Talun.

Jawab:

Wa'alaikum salam. Terimakasih Hadi atas usulannya. Soal bangunan bersejarah dan cagar budaya sebenarnya sudah ada aturannya, yakni UU Nomor 11/2010. Dalam UU ini sudah ditentukan bahwa syarat bangunan cagar budaya adalah (a) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; (b) mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; (c) memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan (d) memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Terkait dengan itu kami akan sampaikan ke komisi dan dinas terkait agar memperhatikan ketentuan yang sudah ada.



Usul Ikon Perbatasan

Tanya:

Assalamu'aikum wr. Wb.

Perbatasan merupakan wajah suatu daerah. Namun yang saya perhatikan di Cirebon jangankan perbatasan antar-kecamatan perbatasan kabupaten saja tidak ada sesuatu ikonik, yang menarik. Padahal tiap-tiap kecamatan memiliki ikon tersendiri begitu juga Cirebon.

Andai tiap-tiap batas kecamatan ada taman perbatasan. Dengan ikon tertentu sesuai daerahnya, atau perbatasan Cirebon dengan kabupaten lain dibuat taman perbatasan. Dengan icon menarik untuk istirahat atau berswafoto menjadikan wajah Cirebon semakin indah. Mungkin akan menjadi daya tarik tersendiri untuk singgah di Kabupaten Cirebon.

Diaul haq, Beber.

Jawab:

Wa'alaikum salam. Terimakasih Diaul Haq atas usulannya. Cukup menarik.

Topeng Klana Teruslah Berkelana

Tari Topeng Klana menceritakan Prabu Minakjingga (Klana) yang terpesona pada kecantikan Ratu Kencana Wungu. Ia pun berusaha mendapatkan sang pujaan hati, namun tak berhasil. Kemarahan tak terbandung, segala tabiat buruknya pun terkuak.

Klana adalah salah satu dari topeng Panca Wanda (Panji, Rummyang, Tumenggung, Klana, dan Samba/Pamindo). Dominasi warna merah Klana mewakili karakter yang tempramental. Sosok yang serakah, penuh amarah, dan tidak bisa menjaga hawa nafsu divisualisasikan dalam tari ini.

Kemarahan dalam gerak tari itulah kekhasan dan keunikan Klana. Daya tariknya membuat sang penari, Puspita Sari (21), pun berkelana. "Kami sudah melanglang buana di setiap acara budaya, dalam dan luar daerah. Kalau tidak ada pandemi harusnya kita sudah berangkat ke Uzbekistan," jelasnya.

Meski demikian Klana dibayangi regenerasi penari yang memudar. "Anak sekarang minatnya beda, beruntung ada wajib budaya di Kecamatan Gegecik," jelas Karnati, Pendiri Sanggar Tari Panji Semarang Desa Gegecik Kidul. •vik



Perlu Perbup Penggunaan Dana Desa

Masih banyak Desa yang belum menyusun RKPDes. Harus ada evaluasi agar bisa sinergis antara perencanaan pembangunan di tingkat desa sampai dengan tingkat kabupaten.



Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon terus melakukan upaya pengawasan dalam proses perencanaan pembangunan daerah mulai dari tingkat desa sampai dengan kabupaten. Hal ini menindaklanjuti hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Cirebon agar melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Klangeran.

Dalam kunjungan itu, Camat Klangeran menyampaikan bahwa terkait dengan proses perencanaan pembangunan, terutama dari Pagu Indikatif Kecamatan (PIK) akan terlebih dahulu menampung aspirasi dari desa-desa yang kemudian akan dibawa pada pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan.

Menurutnya, kegiatan dari PIK yang sudah disepakati bersama pada pelaksanaan Musrenbang tersebut untuk pelaksanaan kegiatannya menjadi kewenangan SKPD terkait. Sedangkan yang bersumber dari dana PIS tahun 2020 ini sebagian besar telah diarahkan untuk penanganan masyarakat terdampak Covid-19.

“Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah di tahun 2012 mempromosikan PIK dengan maksud untuk mawadahi usulan-usulan pembangunan yang ada di wilayah, namun kewenangan pelaksanaan tetap ada pada SKPD terkait,” ujarnya.

Menurut Kasie Ekbang Kecamatan Klangeran, untuk dana PIK tahun 2020 tidak ada kegiatan fisik yang dilaksanakan karena dengan adanya wabah Covid-19. Anggaran tersebut diarahkan untuk penanganan terhadap masyarakat terdampak Covid-19.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Abdul Rohman, dalam rapat dengar pendapat, Bappelitbangda telah menyampaikan di beberapa Kecamatan untuk penyusunan dan Musrenbang Kecamatan, RKPDes pada bulan Oktober belum disiapkan, yang seharusnya bulan September sudah siap. Oleh karena itu Komisi I mendorong kepada camat harus bisa memfasilitasi desa dalam menyusun RKPDes pada bulan Juli.

“Yang menjadi kendala di Desa dalam peny-



usunan RKPDes sampai saat ini desa tidak akan menyusun RKPDes sebelum mengetahui terlebih dahulu ADD dan DD nya,” ujar Kasie Kecamatan Klangeran.

Menurutnya, menyikapi hal tersebut pihak kecamatan sendiri telah mengarahkan kepada desa-desa untuk membuat RAPBDes dari bulan November untuk tahun berikutnya. Anggota Komisi I H Junaedi ST menyampaikan, dalam perencanaan di tingkat kabupaten ini ada 4 (empat) sektor yaitu: jalur kewilayahan, sektoral, pikir, dan dana desa.

“Jika berbicara keterbatasan anggaran sebenarnya potensi anggaran sendiri tidak sedikit. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mewujudkan keempat sektor tersebut agar ada sinkronisasi. Untuk itu harus ada tematik kewilayahan di setiap tahunnya, apa saja yang dibutuhkan dan dijadikan sebagai skala prioritas,” jelas Junaedi.

Komisi I DPRD Kab. Cirebon berharap kepada camat harus ada evaluasi agar bisa sinergis antara perencanaan pembangunan di tingkat desa sampai dengan perencanaan pembangunan di tingkat daerah.

Selain itu, Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon juga mendorong Pemda agar membuat Perbup terkait yang menjadi skala prioritas penggunaan DD (Dana Desa) dan ADD disesuaikan dengan Visi, Misi Kabupaten Cirebon. “Dalam masa seperti ini, penting Perbup yang mengatur soal regulasi penggunaan anggaran dana desa yang tepat sebagaimana skala prioritas,” ujar Rohman.



Komisi II Ingin Direksi BPR Astanajapura Dilengkapi

BPR Astanajapura, dari sejak merger pada 25 Agustus 2019 hingga saat ini, masih belum memiliki direksi yang lengkap. Komisi II meminta agar eksekutif segera mengusulkannya ke OJK.



Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wilayah Cirebon. Dalam kunjungan itu komisi II mempertanyakan jabatan direktur di BPR Astanajapura yang hingga kini masih kosong.

Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, H Khanafi menanyakan struktur direksi dari sejak merger, pada 25 Agustus 2019, hingga saat ini BPR Astanajapura masih kekurangan 1 (satu) direksi. "Apakah OJK tidak memberikan sanksi teguran atau cabut izin saja? Apakah masalah ada di BPR atau di eksekutif," ujar Khanafi.

Menurut Khanafi, DPRD Kabupaten Cirebon sedang membahas KUA/PPAS. Di dalamnya ada pembahasan soal penyertaan modal. Sementara direksi belum dipenuhi. "Maka kemungkinan untuk penyertaan modal BPR akan ditangguhkan dulu," jelasnya.

Senada dengan itu, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, R Cakra Suseno, juga menyinggung hal itu. Sejak terakhir pertemuan Komisi II dengan OJK November 2019, dikatakan bahwa tenggat waktu untuk pengisian direksi BPR adalah 120 hari setelah merger.



Namun pada kenyataannya sampai sekarang belum terisi. "Apakah Direksi yang ada ini berniat untuk bekerja sendiri saja? Karena jumlah direksi juga akan berpengaruh pada perolehan deviden, dan bagaimana dengan pelaksanaan relaksasi pinjaman perbankan?" ujar Cakra.

Menanggapi itu, Kepala OJK Wilayah Cirebon Budi Arief, membenarkan hal itu. Direksi BPR Astanajapura belum lengkap. "Pada PD BPR Astanajapura, memang masih belum memenuhi ketentuan POJK No.20/POJK.03/2014 tentang BPR yang mempersyaratkan jumlah direksi dan dewan pengawas

masing-masing berjumlah 2 orang," jelasnya.

Menurutnya, sejauh ini OJK telah menempuh jalur diskusi dengan pihak-pihak terkait. Namun dalam pelaksanaannya pihaknya menyerahkan ke pemerintah daerah sebagai pelaksana dan pengawas BPR. Karena pada prinsipnya OJK juga menunggu ajuan.

"Jika sudah ada ajuan untuk Direksi BPR Astanajapura maka akan langsung kami proses, dan kurang dari 30 hari sudah bisa keluar hasilnya. OJK juga ketat, namun kami harap juga usulan direksi jangan asal-asalan dan dipaksakan yang nanti akan berujung pada penambahan modal jika dikelola oleh orang yang tidak berpengalaman," tutur Arief.

Selain itu, kata Arief pihaknya juga telah melakukan step atau sanksi administratif terhadap BPR berupa teguran tertulis. BPR juga harus segera mengajukan direksi dalam waktu secepatnya.

Menjawab itu, Dedi Samanhudi, Kabag Perencanaan Sekretariat Daerah, mengatakan setelah proses merger, BPR binaannya telah melalui beberapa proses untuk pengisian pengurus sesuai dengan syarat-syarat merger. Namun pihaknya sangat berhati-hati mengingat tolok ukur yang ada harus personal yang kompeten dalam bidangnya.

Hingga bulan April tahun 2020, kata Dedi pihaknya sudah sampai pada ujian tertulis di Universitas Padjajaran Bandung, namun terhalang wabah Covid-19. "Padahal tinggal melalui proses selanjutnya yaitu penyaringan sebelum kami daftarkan ke OJK untuk dilakukan *fit and proper test*. Kami berjanji akan segera menyelesaikan secepatnya," ujarnya.

Menanggapi itu, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mendesak pemerintah daerah, sebagai pembina dan pengawas BPR, untuk segera mengajukan calon direksi BPR Astanajapura. "Harus secepatnya," tandas Khanafi.

Selain itu, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon juga menanyakan ke OJK soal keringanan kredit bank dan pinjaman *leasing* yang terdampak covid-19. Sebagaimana diatur dalam POJK No.11/POJK.03/2020 dan POJK No.14/POJK.05/2020 yaitu dengan memberikan penundaan dan/atau keringanan pembayaran angsuran melalui program restrukturisasi dengan jangka waktu maksimal 1 tahun.

Menurut Khanief, OJK Cirebon menjelaskan bahwa debitur yang mendapat keringanan adalah yang memenuhi persyaratan diantaranya: terkena dampak covid dengan nilai kredit/leasing di bawah Rp10 miliar, pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (kredit UMKM dan KUR). •suf

Kamarang Kelola Sampah dengan Perdes

Pemerintah Desa Kamarang berinovasi mengelola sampah di tingkat desa. Desa di Kecamatan Greged itu pun diganjar penghargaan dari Pemerintah Kabupaten Cirebon dan Provinsi Jawa Barat.



Prestasi Pemerintah Desa Kamarang membuat desa bersih menuai banyak apresiasi. Termasuk dari Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon. Bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, Komisi III pun mengunjungi Kamarang. “Ingin melihat secara langsung pengelolaan sampah di Desa Kamarang. Ini luar biasa. Harapannya bisa menginspirasi desa lain,” jelas Ketua Komisi III Hermanto.

Kadis Lingkungan Hidup, Deni Nurcahya, menerangkan bahwa Desa Kamarang merupakan salah satu desa binaan dalam pengelolaan sampah.

Desa Kamarang mengelola sampah secara mandiri, memilah sampah dari rumah. Sampah organik masuk dalam lubang biopori yang dibuat di halaman rumah warga, dan yang nonorganik dibakar dan yang masih bernilai ekonomis dimanfaatkan. Pada proses pembakaran pun melalui mesin insenerator sehingga meminimalisir asap buangan.

“Pemerintah Desa Kamarang telah membuat Perdes sebagai landasan hukum pengelolaan sampah. Harapannya jika semua desa mampu seperti Desa Kamarang maka persoalan sampah selesai di tingkat desa, tidak perlu diangkut,” ujar Deni.



Menurut Kuwu Kamarang, Endang Kusnandar, sebelum adanya pengelolaan seperti ini, sampah di Desa Kamarang cukup memprihatinkan. Pasalnya saat hujan sampah masuk ke dalam saluran sehingga menyebabkan banjir. Dari kejadian tersebut dilakukan pemetaan dan diskusi dengan lembaga desa untuk kelola sampah.

“Inovasi awal yang dibuat adalah dengan membuat program ‘kelola sampah dari rumah, sampah dibagi menjadi dua, namun masih menemui kendala karena pola hidup warga yang masih kurang disiplin, akhirnya dibuat Peraturan Desa pada tahun 2018 sebagai landasan hukum,” tuturnya.

Dalam Perdes mengatur pembuatan lembaga desa Badan Pengelola Sampah (BPS) yang berfungsi memberikan edukasi kepada warga dengan target masyarakat paham dan mampu memilah dan memilah sampah. BPS terdiri dari 2 unit yaitu teknis

(angkut sampah) dan edukasi (RT, RW dan Kadus). “Kemudian kami beri sanksi sosial, bagi warga yang melanggar membuang sampah sembarangan, fotonya akan dipajang di desa selama 1 bulan,” ungkapnya.

Kemudian, Endang melanjutkan, program berikutnya adalah ‘satu rumah satu lubang biopori’, pembuatannya tidak dengan cara manual melainkan dengan menggunakan mesin. Selanjutnya, ada program satu RT 1.000 polybag, kompos yang dihasilkan dari lubang biopori masuk ke dalam polybag dan ditanami, tujuannya kedepan untuk dijadikan Desa Kamarang menjadi desa wisata.

Pada tahun 2018, lanjut Endang Kusnandar, pemerintah desa telah menganggarkan pembelian mesin insinerator. Asap pembakaran dijadikan asap cair kemudian digunakan untuk pestisida. Namun karena adanya partikel yang tidak baik untuk pertanian, sehingga tidak dilanjutkan. Sedangkan abu sisa pembakaran dijadikan bahan campuran untuk membuat paving blok.

Menurut Endang Kusnandar, dalam Perdes tahun ini semestinya sudah terbentuk bank sampah yang dikelola oleh Bumdes. Namun belum terealisasi akibat fokus pada penanganan covid-19.

Sejauh ini, kendala yang dihadapi diantaranya adalah permasalahan kendaraan operasional roda tiga yang sudah rusak, kemudian penyaluran sampah yang bernilai ekonomis (plastik) masih kalah, jika harus bersaing dengan pelaku usaha serupa yang sudah besar dan mempunyai link perusahaan dengan harga yang bersaing.

“Saya pikir diperlukan suatu badan usaha bersama untuk pasarkan sampah yang bernilai ekonomis sehingga bisa bersaing dengan pelaku usaha serupa,” ujarnya.

Menanggapi itu, Pemerintah Kecamatan sangat mengapresiasi inovasi pengelolaan sampah yang ada di Desa Kamarang. “Besarnya harapan semua desa di wilayah Kecamatan Greged bisa melakukan hal yang sama, sehingga persoalan sampah bisa teratasi,” ujar Camat Greged.

Senada dengan itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten, Hermanto sangat mengapresiasi kerja keras dan inovasi pengelolaan sampah di Desa Kamarang, harapannya semua desa di Kabupaten Cirebon bisa melakukan hal yang sama.

“Dengan adanya Perdes yang dibuat oleh desa Kamarang hal ini yang patut ditiru oleh desa lain, supaya pengolahan sampah bisa dilakukan dari mulai tingkat desa, dengan menyesuaikan kondisi dan wilayahnya,” pungkasnya. •suf

Produktivitas Padi Panguragan-Kapetakan Dihantui Banjir

Hasil panen padi di wilayah Kecamatan Panguragan dan Kapetakan berhasil melampaui target. Sayangnya, produktivitas mereka masih dihantui tata kelola air.



Sawah di Kecamatan Kapetakan Banjir

Dalam rangka melihat efektifitas pencapaian tanam tahun 2020, Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon mengunjungi UPT Pertanian Kecamatan Panguragan dan Kapetakan. Persoalan tata kelola air mengemuka dalam kunjungan itu.

Kabid Tanaman Pangan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, mengatakan bahwa produktivitas panen Kecamatan Panguragan telah mencapai 64,75%, sedangkan provitas untuk Kecamatan Kapetakan adalah 65,74%. "Ini sudah melebihi yang ditargetkan," tandasnya.

Menurutnya, Kecamatan Panguragan dan Kapetakan sudah tutup panen pada Mei dengan

produktivitas padi yang bagus. Rencananya akan mulai tanam lagi pada bulan Agustus mendatang dengan harapan bulan Desember bisa tutup tanam. "Dengan adanya Bendung Rentang Jatigede, kami berharap mulai Tahun 2021 bisa tanam sampai tiga kali," ungkapnya.

Kepala UPT Pertanian Kecamatan Panguragan, Darwadi, mengatakan bahwa UPTD Pertanian Kecamatan Panguragan mencakup dua Kecamatan yaitu Panguragan dan Kapetakan. Potensi wilayah Kecamatan Kapetakan dengan luas sawah 3.000 hektar dan lahan darat 2.964 hektar. Sedangkan di wilayah Kecamatan Panguragan memiliki lahan sawah selu-



Foto: antara

as 1.686 hektar dan lahan darat 403 hektar.

Dengan potensi seluas itu, Darwadi mengeluhkan bahwa UPT terkendala kekurangan SDM dalam pengelolanya. Seperti diketahui, jumlah penduduk Kecamatan Kapetakan yang bermata pencaharian di sektor pertanian mencapai 7.525 orang. Sedangkan Kecamatan Panguragan 5.924 orang.

Selain SDM, menurut Darwadi permasalahan yang ada di Kecamatan Panguragan dan Kapetakan diantaranya adalah banjir yang disebabkan oleh pendangkalan muara sungai di kali pembuang. Pendangkalan di Kalimalang Kec. Suranenggala yang membutuhkan normalisasi. Juga pintu air yang rusak di sungai pembuang yang sudah harus diganti. Selain itu penyebab lain banjir adalah banyaknya eceng gondok.

Selain banjir, lanjut Darwadi permasalahan kekeringan yang diantaranya disebabkan oleh perubahan iklim yang tidak menentu, kondisi irigasi yang tidak cukup/debit air kecil. Kemudian pompa air yang masih kurang, dan pendangkalan saluran krapyak, yang diantaranya membutuhkan solusi pengaturan air dari bendung rentang, normalisasi, dan bantuan pompa dari Pemerintah.

"Kami juga membutuhkan alat perontok padi/power tresher dan combain besar sebagai salah satu

upaya pemanfaatan biaya dan penambahan keuntungan petani, selain untuk pengamanan produksi dan kualitas gabah yang lebih baik," ujarnya.

Sejalan dengan itu, Sudarma, Koordinator BPP Kecamatan Panguragan juga mengusulkan untuk normalisasi Bendungan Gandasari. Rehabilitasi dan normalisasi saluran krapyak dari Dam Gandasari menuju Dam Makmur sepanjang 1,5 km. Ini juga untuk mengantisipasi tanggul bendungan jebol karna kontruksi yang sudah tidak baik. "Kami juga mengajukan usulan untuk pintu otomatis hidrolik, juga pemeliharaan kali-kali pembuang dari gulma eceng gondok," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Cirebon, Mad Saleh, mengimbau kepada dinas pertanian agar lebih memperhatikan pemanfaatan sumber air atau tata kelola air. Untuk itu perlu membuat peta tata kelola, agar kendala yang ada bisa secepatnya diselesaikan.

"Kami berharap dinas pertanian agar lebih memperhatikan pemanfaatan sumber air dengan memberikan dan mengedukasi peta tata kelola kawasan. Selain itu harus lebih memperhatikan nasib para penyuluh dalam mengelola wilayah binaanya," jelas Mad Saleh. •suf

Rudiana: Kebaikan Akan Menemukan Jalannya

Baginya uang bukan untuk dinikmati sendiri, tapi agar bisa berbagi. Ia sedih jika tangannya tak mampu menjangkau mereka yang papa. Berpolitik baginya pun sarana untuk berbagi. Itulah yang membuatnya menjadi pimpinan DPRD.



ia menjadi bos bagi kawan-kawan kecilnya. Soal keuangan tak pernah kurang, jika habis salah seorang teman membantunya, datang ke toko ayahnya untuk meminta. Setelah itu mereka jajan bersama.

“Waktu kecil saya dianggap bos oleh teman-teman. Karena saya anak satu-satunya dari bapak, jadi dimanja. Soal keuangan Alhamdulillah tidak kurang dan sering ngasih jajan teman-teman,” ungkap sang pemilik nama Rudiana, SE.

Masa kecilnya sebagai orang desa penuh cerita. Sawah dan sungai menjadi arena asik untuk bermain. “Dulu waktu kecil hobi mancing bareng teman-teman, mandi di sungai karena dulu airnya belum kotor. Pergi ke sawah karena kita kan daerah pedesaan. Cari ikan pakai portas. Pokoknya masa kecil di desa itu seru dan konyol,” kenang pria kelahiran Cirebon, 11 November 1979 ini.

Selesai menamatkan pendidikan dasarnya di SD Bakung, ia melanjutkan ke SMP Kapetakan. Meski ada SMP terdekat, ia memilih sekolah yang berjarak 6 KM dari rumahnya. “Saat itu kan masih pakai NEM, jadi ceritanya yang sekolah di SMP Kapetakan itu siswa-siswa yang pintar. Karena NEM saya masuk di sekolah itu, maka saya dianggap pintar,” jelasnya.

Jauhnya jarak tidak membuatnya mengeluh. Tidak pula bermanja agar diantar orang tua. Ia mengayuh sepeda dari rumah ke sekolah. Sebetulnya saat itu sudah ada angkutan umum, hanya saja sopir menolak jika penumpangnya anak sekolah. “Ke sekolah naik sepeda, padahal ada sih angkutan umum. Tapi kalau anak sekolah ongkosnya murah jadi tidak mau,” ungkapnya.



“Paling kalau naik angkutan umum ya duduk diatap atau bergantung. Sebab sopir lebih memilih penumpang umum dari pada anak sekolah. Karena begitu ya mending naik sepeda tidak berbahaya. Anak-anak zaman dulu sih tidak ada yang diantar orang tuanya. Mereka kuat-kuat dan mandiri,” lanjutnya.

Pernah suatu pagi ia berangkat sekolah dengan mengayuh sepeda. Saat menyebrang jembatan dari bambu, ia terpeleset dan terjebur. “Pernah tercebur saat menyebrangi jembatan bambu. Saat itu berangkat sekolah, karena baju saya basah semua akhirnya pulang lagi. Saat itu sempat ditolong oleh warga dan memberinya baju ganti,” ungkapnya.

Setelah menyelesaikan studi di tingkat SMP, ia melanjutkan ke STM (SMKN 1 Cirebon). Sebetulnya saat itu ia belum begitu paham tentang rencana pendidikannya kedepan. Namun karena terinspirasi oleh kakaknya yang mengambil jurusan teknik sipil maka ia masuk STM. “Tapi ternyata saya salah. Karena di STM lebih banyak praktik, sehingga merasa kesulitan untuk

mengikuti tes UMPTN,” jelasnya.

“Sampai saya ikut bimbel ke Bandung selama tiga bulan, tapi tetap susah dan merasa repot dibanding teman-teman yang lulusan SMA. Jadi saya merasa terjebak masuk STM tuh karena tidak bisa fokus mengikuti UMPTN. Akhirnya saya tidak masuk UMPTN dan ambil kuliah di Unkris Jakarta,” lanjutnya.

Ia mengambil jurusan arsitektur. Namun pada saat memasuki semester 6 kabar duka datang. Sang ayah meninggal dunia, sehingga mengharuskannya kembali ke kampung halaman. “Saya di Unkris sampai semester 6. Karena saat itu bapak meninggal sehingga saya pulang untuk meneruskan usaha beliau. Padahal saat itu sekitar 20 SKS lagi selesai,” jelasnya.

Setelah berhenti selama satu tahun pasca kepulangannya dari Jakarta. Sambil mengurus usaha ia melanjutkan ke STTC Cirebon. “Saya sempat melanjutkan ke STTC Cirebon dan sempat kembali ke Jakarta. Dulu saya menggambar dengan manual, bisa dari jam empat sore sampai subuh. Kalau sekarang bisa pakai aplika-



si. Karena waktunya sudah direpotkan dengan usaha sehingga tidak fokus,” ungkapnya.

Karena terlalu fokus dengan usaha, ia memutuskan untuk putar haluan. Ia melanjutkan studinya di Yasmi dengan jurusan Ekonomi. “Saya putar haluan dari arsitektur ke ekonomi. Jadi saya lanjut kuliah di Yasmi Cirebon dan mendapat gelar Sarjana Ekonomi,” jelasnya.

Usaha baginya bukan sekedar aktivitas ekonomi, tapi menjadi hobi. Ia berkeyakinan akan dapat membantu banyak orang ketika punya uang. Sehingga ia memanfaatkan posisinya sebagai dewan untuk pengabdian bukan mencari uang. “Bagi saya usaha nomor satu, menjadi dewan itu pengabdian,” jelasnya.

“Saya berpikir kalau mau bantu orang maka saya harus ada uang. Di waktu senggang saya berdagang. Jam tujuh pagi saya buka toko, sebelum berangkat ke kantor. Sabtu minggu saya jaga toko dan pulang dari kantor saya sempatkan untuk belanja ke kota,” lanjutnya.

Usaha juga menjadi sarana berinteraksi dengan banyak orang. Ia bertemu konsumen

dengan berbagai latar belakang dan golongan. “Dengan usaha kita bisa berinteraksi dengan masyarakat. Di sela-sela membeli mereka menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik, juga menyampaikan aspirasi. Karena konsumen saya itu dari semua kalangan. Ada petani, PNS, perangkat desa, dan lainnya,” jelasnya.

Pemilu 2019 merupakan periode ketiga ia duduk sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Karirnya politiknya berawal dari ikut-ikutan. Saat itu ada saudaranya yang menjadi dewan. “Awalnya saya ikut saudara yang jadi Dewan. Saya melihat PDIP adalah partainya wong cilik. Hampir kepemimpinan di tingkat desa dan kecamatan dipegang oleh kalangan bawah, seperti tukang becak, dan petani,” jelasnya.

Ia pun tergugah untuk memperjuangkan wong cilik. Kemudian ia bergabung ke PDIP. Meskipun saat itu ia masih baru, namun loyalitas terhadap rekan-rekan dan rekam jeaknya yang sering membantu masyarakat menjadikannya sebagai ketua PAC PDIP Kecamatan Jamblang. Setelah

menjadi Ketua PAC, tahun 2009 ia mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Cirebon.

“Setelah menjadi PAC, Pemilu 2009 saya mencalonkan Dewan. Awalnya ragu karena harus bersaing dengan saudara. Saya mendapat nomor urut 5. Sebetulnya sempat pesimis sebab waktu itu ditentukan oleh no urut. Saya niatkan untuk ibadah, dan keajaiban datang Ketika MK merubah aturan menjadi suara terbanyak. Alhamdulillah saya mendapat suara terbanyak di PDIP sebesar 7.400,” jelasnya.

Track record nya sebagai pribadi yang ringan tangan kepada masyarakat menghantarkannya menjadi anggota DPRD Kabupaten Cirebon periode 2009 – 2014. “Sejak kecil saya menjadi bos untuk teman-teman. Saya juga tidak sungkan untuk membantu masyarakat. Mungkin karena keberkahan itu sekarang saya jadi *bos rakyat*,” terangnya.

Politik baginya harus menggunakan cara-cara santun. Ia berkomitmen untuk bisa menebarkan manfaat bagi masyarakat. “Saya ingin selalu bermanfaat bagi masyarakat. Baik imbasnya nanti langsung ke saya atau tidak. Bagaimanapun apa yang kita tanam akan kita tunai, baik secara langsung atau nanti ke anak cucu kelak,” jelasnya.

Meskipun politik sarat akan kepentingan, namun ia mengaku tidak memiliki ambisi lebih. Ia melakukan semuanya atas dasar pengabdian. Membantu masyarakat yang membutuhkan. Prinsip yang ia miliki tersebut membawanya pada posisi sebagai pimpinan dewan. “Saya tidak menyangka menjadi pimpinan. Saya tidak memiliki ambisi, selalu menjalani sesuai alur dan senantiasa berbuat baik,” pungkasnya. •Mol



Agrowisata Gedong Gincu Mendunia, Berawal dari 35 Bibit Gratis

Mangga gedong gincu sudah diekspor ke mancanegara. Kini are perkebunannya dikembangkan menjadi destinasi wisata. Selain mencoba kesegaran mangga, pengunjung juga bisa menikmati kesegaran alam.

Pemandangan perbukitan yang menakjubkan, hamparan sawah, dan memetik mangga matang di pohon dengan tangan sendiri, itulah sederet sensasi yang ditawarkan Agrowisata Gedong Gincu. Belum lagi, soal rasa dan kualitas mangga, sudah menjadi komoditi ekspor ke mancanegara. Namun, siapa sangka semuanya itu

berawal dari 35 bibit gratis.

Mangga gedong gincu Cirebon memiliki perpaduan asem, manis dan segar. Perpaduan rasa itu menjadikannya unggul, dibanding rasa gedong gincu dari Indramayu dan Majalengka. Dari sisi ukuran, lebih besar dari gedong gincu Indramayu lebih kecil dari Majalengka.

Agrowisata Gedong Gin-

cu berada di Desa Sedong Lor. Area perbukitan di Kecamatan Sedong ini sekitar 30 km ke arah selatan dari pusat Kota Cirebon. Ada beberapa alternatif jalur untuk sampai kesana.

Pertama, dari pintu keluar tol Ciperna Barat ambil arah ke selatan menuju pasar sedong melalui Greded. Bisa juga dari pintu tol Kanci ke barat menuju Cipeu-



Foto: ilindudida.com

jeuh lewat Buntet Pesantren, kemudian ke arah Pasar Sedong.

Melalui jalur ini track menanam sedong kidul dan sedong lor di situlah perkebunan mangga berada. Sepanjang jalan berjajar rapih pohon mangga hingga ke Setu Sedong.

Kedua, jalur dari Kabupaten Kuningan, bisa ditempuh dari Pasar Cilimus. Dari jalur ini maka sebelum sampai di perkebunan mangga gedong gincu, akan melewati indah Setu Sedong.

Mendekati rumah sang pemilik perkebunan, terdapat kolam ikan memanjang. Tampak pula bangunan seperti villa kecil untuk disewakan. Tidak jauh darinya ada gudang mangga.

"Dari mana? Siapa ya?" tanyanya sambil mempersilakan duduk. "Maaf sudah 4 tahun ini saya sakit, kata dokter terjadi penggumpalan darah, stroke

otak. Jadi ingatan saya tidak sebaik dulu."

Adalah Chaerudin, pria kelahiran 1960 tinggal di Desa Sedong Lor, Kecamatan Sedong, sang pemilik rumah itu. Ia telah berhasil mengenalkan mangga gedong gincu Cirebon ke tingkat nasional, bahkan internasional. Selain presiden Susilo Bambang Yudhoyono, perwakilan 11 negara sudah mengunjungi perkebunannya.

Meski mengaku tidak seprima dulu, saat ditanya tentang agrowisata gedong gincu semangatnya tampak berapi-api. "Sekarang anak semata wayang saya, Hendrik Nurwanto, yang meneruskan, namun kebetulan hari ini sedang ke Jakarta untuk sebuah keperluan," jelasnya.

Chaerudin hanyalah lulusan SMEA. Pada 1982 ia melanjutkan usaha dagang matrial milik orang tuanya. Akhir 90-an mengalami kebangkrutan, berbagai

usaha lainnya pun dilakoninya.

Pada tahun 2001 barulah ia menanam gedong gincu. Ia teringat pesan kakeknya "*Lamun hayang sugih mukti geura tani, hayang gede hutang geura dagang, hayang bingung geura nyandung*" (kalau ingin kaya bertani, kalau ingin banyak utang berdaganglah, kalau ingin bingung poligamilah).

"Awalnya hanya 200 bata lahan peninggalan orang tua, tahun 2001 ditanami 35 pohon mangga dari bantuan dinas pertanian, empat tahun kemudian barulah bisa dipanen, satu pohon bisa menghasilkan 3-5 kg mangga gedong gincu," jelasnya.

Chaerudin terus belajar secara otodidak. Ia menemukan tinggi ideal pohon mangga adalah lima meter. Ini memudahkan untuk pemeliharaan, penyemprotan, dan panen. "Agar tidak terlalu tinggi kita gunakan sistem pemangkasan bentuk dan pemangkasan produk," jelasnya.

Selain itu ia juga mengatur jarak tanam, agar ada yang hasil harian seperti kangkung, bulanan seperti padi, dan tahunan mangga. Mirip seperti pola tumpangsari. "Saya juga kombinasikan penggunaan pupuk organik sebelum hujan, dan anorganik pasca hujan, juga NPK mutiara." jelas Ketua Kelompok Tani Suka Mulya ini. Hasilnya sangat memuaskan.

Setelah usia pohon 13 tahun, hitungan minimal per pohon menghasilkan 50-60 kg mangga, bahkan bisa 1 kwintal. Dengan luas lahan 13 ha bisa menghasilkan pertahun Rp 1,3 miliar, dengan biaya perawatan Rp 300-350 juta/tahun.

Mangga gedong gincu yang dihasilkan dijual ke Jakarta dan ke luar negeri. Di Kabupaten Cirebon, musim panen raya an-



Foto: wartatani.co

tara Oktober hingga Desember. Musim panen sedang antara Juli hingga September, sedangkan panen di luar musim (*off season*) antara bulan April hingga Juni.

Pasar mangga gedong gincu sudah berhasil masuk ke berbagai segmen, baik pasar tradisional seperti pasar induk Cibitung, Muara Angke, Caringin, Kramat Jati, perdagangan

antar pulau di Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan; meupun pasar modern seperti Carefour dan Aeon. Beberapa negara tujuan ekspor adalah Kuwait, Arab Saudi, Singapura, dan Malaysia.

Selain Cirebon, di Jawa Barat perkebunan mangga gedong gincu ada di Majalengka 500 Ha, Indramayu 1.000 Ha. Di Cirebon ada 1.000 Ha, tersebar di

Kecamatan Sedong, Kecamatan Greged, Kecamatan Beber, Kecamatan Lemah Abang, Kecamatan Astanajapura, Kecamatan Sumber dan Kecamatan Dukupuntang.

Di Sedong Lor ada 25 Ha lahan yang ditanami mangga gedong gincu, termasuk 13 Ha yang menjadi garapan Chaerudin (8 Ha milik pribadi dan 5 Ha sewa lahan). Sedangkan se-Kecamatan Sedong sebanyak 500 Ha.

Chaerudin menghimbau agar tidak minder menjadi petani, dan jangan terpaku pada satu jenis tanaman saja. "Padahal tani itu profesi yang luhur karena semua manusia menikmati hasil bumi. Mangga ini menjanjikan, tirulah yang sudah berhasil. Jangan menanam padi saja. Pola pikirnya hidup bukan makan mangga tapi makan nasi, harus diubah," jelasnya.

Terlebih gedong gincu sudah punya nama, dan dikenal dunia. Nah, bicara soal nama, menurut Chaerudin, bernilai sejarah. "Awal sejarah nama mangga gedong gincu berasal dari orang-orang Gujarat yang membawa mangga, dan mangga tersebut dibeli oleh orang-orang gedongan (kaya) di Cirebon, sehingga dinamai gedong, nah gincu karena warnanya kemerahan. Pohon mangga tersebut ditanam di Keraton Kasepuhan Cirebon yang sampai sekarang pun pohonnya masih ada," tuturnya.

Kedepan Agrowisata Gedong Gincu Sedong Lor akan dilengkapi dengan kolam renang, baik bagi orang dewasa maupun anak-anak. Ini untuk melengkapi wisata kuliner yang sudah ada. "Sehingga selain berwisata, anak-anak juga sejak dini dikenalkan dengan pertanian agar bangga menjadi petani," pungkasnya. • **fir**



Pepaya California Potensi Tonjong Menarik Wisatawan

Nama boleh saja california, tapi itu asli pepaya hasil bumi Desa Tonjong. Rasanya enak, produk olahannya beragam, dan datanglah, pemandangan perkebunan begitu menakjubkan. Itulah kini yang sedang dikreasikan warga Tonjong.

Tak banyak yang mengenalnya. Bahkan, warga Desa Tonjong sendiri merasa kurang diperhatikan. Namun, kini desa yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes dan Kuningan ini bersiap-siap untuk terkenal. Mereka sedang bersemangat menarik wisatawan.

“Tonjong ini desa perbatasan yang memiliki lahan pertanian sangat luas, dan lahan tum-pang sari dengan perhutani. Namun, kondisi infrastruktur sa-

ngat memprihatinkan,” ungkap Yuherna, Kuwu Desa Tonjong.

Barulah akhir 2019, bupati menerbitkan Perbup Nomor 59, tentang Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrowisata Tonjong, Kecamatan Pasaleman, 2020-2024. Inilah yang memantik semangat warga Tonjong.

“Kami telah membuat Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), untuk memulai menyadarkan dan membuat inovasi untuk terwujudnya Agrowisata Tonjong,”

ungkap Ade Irawan, Ketua Pokdarwis Desa Tonjong.

Untuk mewujudkan suksesnya pembangunan agrowisata memerlukan perencanaan dan perancangan yang baik. Tokoh Penggerak Agrowisata Tonjong, H. Udin, mengatakan bahwa agrowisata merupakan rangkaian kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi pertanian sebagai objek wisata. Potensi itu bisa berupa pemandangan alam kawasan pertanian, maupun

kekhasan dan keanekaragaman aktivitas produksi dan teknologi pertaniannya, serta budaya masyarakat pertaniannya.

“Agrowisata atau wisata pertanian didefinisikan sebagai rangkain aktivitas perjalanan wisata yang memanfaatkan lokasi atau sektor pertanian mulai dari awal produksi hingga diperoleh produk pertanian dalam berbagai sistem dan skala dengan tujuan memperluas pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan rekreasi di bidang pertanian,” papar H. Udin.

Kegiatan pengumpulan data dan informasi di kawasan perdesaan Kecamatan Pasaleman telah dilaksanakan pada 22 sampai 28 April 2019. Kegiatan yang bertempat di Desa Cilengkrang-girang itu mengundang tujuh desa, dua diantaranya Tonjong dan Tanjung Anom.

Hasil pengumpulan data diperoleh beberapa potensi besar, salah satunya pepaya Calina (California) di Desa Tonjong, di lahan seluas 170-175 Ha dengan produksi 350 ton/tahun dengan keuntungan Rp 184.301.169 per Ha/tahun. Calina menjadi pilihan mereka.

Inovasi Agrowisata Tonjong

Setelah Pemda Kabupaten Cirebon mengusulkan penetapan pembangunan kawasan perdesaan Agrowisata Tonjong ke Kementerian Desa dan PDT. Kementerian pun bergerak, mengadakan pelatihan yang sesuai dengan potensi kawasan perdesaan.

Beberapa pelatihan yang digelar adalah pengolahan produk olahan pepaya, desa wisata, pengolahan limbah tebu, budidaya ternak kecil, pembuatan pupuk organik, pengolahan sampah, kewirausahaan, dan e-commerce.



Selain pelatihan juga membuat lokakarya. Kesepakatan lokakarya menetapkan bahwa pelatihan pengolahan produk pepaya perlu diintensifkan untuk mendukung agrowisata dan menjadi ciri khas lokal.

Pelatihan Prukades (Produk Unggulan Kawasan Perdesaan) Angkatan I di tahun 2019 dilaksanakan di Desa Tonjong, pada 27 sampai 31 Agustus 2019. Pelatihan ini diikuti oleh 30 orang peserta dari Desa Tonjong dan Tanjung Anom yang terdiri dari perwakilan kelompok tani, ibu PKK, pengurus Bumdes dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata).

Pelatihan memberikan gambaran mengenai teknologi pasca

panen dan pengolahan pepaya, pengenalan GMP (Good Manufacturing Practices). Praktik pengolahan pepaya untuk meningkatkan nilai tambah buah pepaya yang bentuknya tidak seragam, daging buah cenderung kekuningan, rusak sebagian tapi masih dapat dikonsumsi.

Pepaya kategori itu diolah menjadi permen lunak (soft candy), manisan, mie kremes dan sistik. Tentu saja dilengkapi dengan analisis usaha, teknologi pengemasan dan penyimpanan. Selain itu peserta juga diajarkan tentang pelabelan produk, cara menentukan masa kadaluarsa produk, dan proses pengajuan PIRT dan serifikasi halal. •fal

Mohamad Luthfi



Akun Palsu

“Kang bener nih minta dikirim pulsa?” Begitu bunyi sebuah pesan yang masuk ke aplikasi *chatting* di ponsel. Tadinya mau saya jawab dengan bercanda: “Iya, yang banyak yah.” Namun, buru-buru saya hapus.

Terbersit: sepertinya ada yang tidak beres. Setelah dikonfirmasi, ternyata benar apa yang saya pikirkan. Jejaring pertemanan saya di facebook kena serangan akun palsu. Akun itu mengatasnamakan saya. Foto profil yang digunakan persis seperti akun facebook saya.

Beruntung beberapa teman segera memberi kabar. Sehingga, beberapa upaya saya lakukan. Tentu saja agar tidak ada korban, terkena tipuan murahan.

Kasus serupa, sebenarnya sering saya dengar. Di dunia maya orang dengan mudah bisa menjadi apa dan siapa saja. Seorang laki-laki bisa menjadi perempuan. Begitupun sebaliknya. Tinggal buat nama dan pasang foto sesuai gender.

Satu orang bisa memiliki puluhan bahkan ratusan akun. Tentu saja tujuannya macam-macam. Ada yang baik, untuk mempromosikan produk, ada juga yang menekuninya sebagai alat tipuan.

Dengan multi-akun seseorang bisa memerankan banyak karakter. Dalam hitungan detik orang bisa mengubah personifikasi sesuai akun yang sedang ia hidupkan. Bahkan memungkinkan dalam waktu bersamaan menjalankan beberapa akun. Tentu dengan multi-perambah, atau multi-perangkat.

Jika di dunia maya begitu mudah akun palsu tercipta, bagaimana dengan dunia nyata? Dalam seni bermain peran, seperti teater, drama, atau film, tentu saja itu terjadi. Namun, meski itu nyata, tetap saja dalam dunia kepura-puraan. Akun palsu juga dalam format yang lain.

Akun-akun palsu itu dengar sadar dibuat. Tentu dengan motif dan tujuan yang jelas, meski ada yang bertujuan buruk. Namun, tetap dengan kesadaran dan kesengajaan.

Tahukah Anda ada loh akun palsu yang terbuat dengan tidak sadar. Itu terjadi, bahkan jauh dari

dunia virtual ada. Ini terjadi benar-benar di dunia nyata. Tidak percaya?

Sekarang cobalah cek pada diri Anda. Ya, diri Anda, pribadi Anda. Adakah akun palsu? Kalau Anda belum menemukan, cobalah ingat hakikat Anda ada di dunia ini untuk apa?

Jika (maaf) Anda sebagai manusia, bagaimana hari-hari Anda lalui selama ini? Pribadi seperti apakah diri Anda? Jika pemaarah, kasar, semanya sendiri. Maka bisa jadi, Anda bukan lagi jadi manusia. Mungkin (maaf) sudah menjadi binatang. Sudah hilang hakikat kemanusiaan Anda, yang ada akun palsu kebinatangan.

Coba cek lagi, apakah kejahatan adalah hari-hari Anda? Jika mencuri, merampas, menipu, atau membunuh adalah kebiasaan Anda, maka sesungguhnya ada akun palsu pada diri Anda.

Jika Anda mendapati banyak maksiat yang Anda kerjakan sehari-hari dengan menggunjing, ghibah, iri, dengki, hingga lalai ibadah, maka bisa jadi ada akun palsu. Akun itu (maaf) berupa syetan yang sedang mendominasi Anda.

Sahabat, mari kita sama-sama men-scan keberadaan akun palsu dalam diri kita. Apalagi akun palsu itu terbentuk bukan karena sebuah kesengajaan, tapi karena ulah tipu daya syetan.

Jika diri Anda tak mampu men-scan diri, maka mintalah bantuan orang terdekat Anda. Dengan kelembutan dan kasih sayangnya, Anda akan terbantu menemukan diri Anda yang sebenarnya. Sekaligus menemukan akun palsu.

Pasanglah aplikasi anti-virus terbaik pada diri Anda. Dekatkanlah diri kepada Yang Maha Kuasa. Agar terlindungi dari akun palsu yang ada dalam diri Anda. Juga agar mampu terhindar dari godaan akun palsu yang ada pada orang lain.

Yakinlah, pada dasarnya akun asli tetap akan lebih baik dari akun palsu. Maka, jagalah, rawatlah, dan cintailah akun asli Anda, pasangan Anda, keluarga Anda, dan orang-orang di sekeliling Anda.



SEKRETARIAT DPRD DAN SELURUH PEGAWAI



Ikin Asikin, S.Sos., M.Si.
Sekretaris DPRD Kab. Cirebon



Wawan Siswandar, SE., M.Si.
(P) Kabag Umum DPRD Kab. Cirebon /
Kabag Kesangan DPRD Kab. Cirebon



Drs. Raden Chaidir Susilaningrat
Kabag Persidangan DPRD Kab. Cirebon



Drs. H. Sucipto, MM.
Kabag Perundang-undangan DPRD Kab. Cirebon

Mengucapkan Selamat

Hari Raya Idul Adha

10 DZULHIJAH 1441 H





**PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON**



H. Mohamad Luthfi, ST, M.Si
(Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Rudiana, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Teguh Rusiana Merdeka, SH
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)



Drs. H. Subhan
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon)

Mengucapkan Selamat

Hari Raya Idul Adha

10 DZULHIJAH 1441 H

